

MENGGAGAS PARADIGMA BARU PENDIDIKAN

DEMOKRATISASI,
OTONOMI,
CIVIL SOCIETY,
GLOBALISASI

SINDHUNATA, EDITOR



PENERBIT KANISIUS

Industrialisasi Pendidikan

Berkah, Tantangan, atau Bencana bagi Indonesia?

Ariel Heryanto

Pada saat ini masyarakat dunia menghadapi sebuah perubahan sosial besar-besaran dengan corak, istilah, tempo, sosok, peluang, hambatan, serta makna historis yang berbeda-beda. Karena itu, sejarah lokal dan nasional tidak pernah seragam di seantero dunia. Namun, semuanya tidak terlepas satu sama lain. Perubahan global ini ditandai antara lain oleh berakhirnya Perang Dingin, dan bersamaan dengan itu semakin maraknya pertumbuhan industri kapitalisme dunia. Istilah seperti "globalisasi" merupakan salah satu contoh saja dari upaya terkemuka dari beberapa pihak untuk memahami atau memaknai perubahan besar-besaran ini. Tetapi, dengan berbagai variasi maknanya, globalisasi tetap tidak memuaskan semua pihak yang terlibat atau terkena dampak perubahan ini. Sebagian menganggap istilah ini besar bunyinya tapi kosong maknanya atau hanya menyatakan kebingungan orang banyak.

Yang sedang berkecamuk bukan sekadar perubahan tata politik dunia, atau tata perimbangan kekuasaan militer, atau suatu dinamika ekonomi dan keuangan dunia yang baru. Berbagai sektor perubahan itu memang terjadi dan semua itu menjadi sorotan utama ketika orang berdiskusi tentang masyarakat mutakhir dengan menggunakan istilah-istilah kunci seperti industri, kapitalisme, atau globalisasi. Tetapi, perubahan sejarah besar-besaran yang sedang kita alami dalam beberapa tahun belakangan juga memperlihatkan hal-hal yang biasa disebut sebagai kebudayaan, nilai-nilai, selera, gaya hidup, ideologi, solidaritas sosial, gairah, identitas sosial, dan sebagainya. Semua yang tersebut belakangan ini jarang mendapatkan perhatian dan pengamatan sebesar yang diberikan orang kepada persoalan-persoalan politik atau ekonomi.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak kebal dari gelombang perubahan besar-besaran itu. Dilihat secara makro seperti ini, berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan militerisme Indonesia — seperti juga terbentuknya Orde Baru itu sendiri — tidak dapat dilepaskan (kalau tidak mau dikatakan merupakan tuntutan dan akibat) dari pergolakan mendunia itu. Jatuhnya Soeharto bukan sekadar karena krisis ekonomi atau sekadar hasil perjuangan kaum martir

yang dipimpin oleh para aktivis kelas menengah terdidik Indonesia. Begitu juga kemerdekaan nasional Timor Loro Sae bukan sekadar karena ada referendum plus perjuangan gigih rakyat Timtim. Krisis ekonomi dan pertumbuhan gerakan pro-demokrasi (atau Reformasi) itu dapat diamati sebagai bagian dan hasil dari sebuah proses sejarah sosial yang panjang dan kompleks yang bergerak pada skala dunia. Nasib Indonesia selanjutnya juga tidak sepenuhnya di tangan bangsa Indonesia — apalagi di tangan segelintir elite politik di Jakarta — tetapi merupakan hasil berbagai perpaduan dan konflik antara kekuatan sosial yang sebagian lokal, sebagian nasional, tetapi juga sebagian tidak kecil bersifat global.

Pranata sosial yang dinamakan "pendidikan" di Indonesia tidak bisa tidak terjerat dan sekaligus tergerak dalam berbagai arus perubahan sosial yang menggelisahkan dan sering membingungkan ini. Uraian berikut memaparkan beberapa pengamatan, dan berupaya memahami beberapa kecenderungan yang terjadi dalam bidang pendidikan formal khususnya pada tingkat pendidikan tinggi di Indonesia dalam periode dan proses perubahan yang ditandai oleh kuatnya watak industrialisasi global. Asumsi dasar yang digunakan dalam pembahasan berikut ini dapat dirumuskan sebagai berikut: proses industrialisasi pendidikan sudah dan sedang secara besar-besaran terjadi di Indonesia; proses ini menjadi gencar dalam kurang-lebih dua puluh tahun terakhir dan mungkin akan berlanjut, kalau bukannya menjadi semakin marak, dalam tahun-tahun mendatang.

Uraian berikut tidak dimaksudkan sebagai sebarang penilaian, apalagi penghakiman, terhadap proses yang sedang berlangsung. Tulisan ini tidak mengutuk, menolak, atau menyayangkan garis besar proses perubahan yang dibahas di sini, tetapi juga tidak dimaksudkan sebagai dukungan dan sambutan tanpa sikap kritis. Tulisan ini tidak mempersoalkan apa atau siapa yang baik/benar. Justru salah satu pokok yang ingin dikemukakan di sini adalah perlunya mempertanyakan kembali apa yang selama ini telanjur dianggap secara kaku sebagai nilai-nilai baik/buruk jika kita ingin memahami berbagai perubahan besar-besaran yang berlangsung dalam dunia pendidikan dan masyarakat.

SIKAP PENGAMAT DAN OBJEK BAHASAN

Sikap dan prasangka seorang pengamat sosial selalu menentukan objek dan sifat pembahasannya. Apa yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti di banyak tempat lain, telah diamati dan dibahas secara berbeda-beda oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Dua di antaranya tampak saling bertolak belakang.

Di satu pihak, kita jumpai mereka yang menyaksikan nasib pendidikan dengan wajah muram, dan membahasnya dengan penuh ratapan, penyesalan, kalau bukan kemarahan. Antara lain, mereka mengatakan bahwa mutu pendidikan kita semakin merosot (dengan berbagai ukuran dan penyebab yang

tidak seragam dalam berbagai uraian mereka). Hal-hal seperti industrialisasi atau globalisasi dianggap sebagai sebuah ancaman atau musuh pendidikan.

Di pihak lain, kita juga jumpai mereka yang dengan giat membuka berbagai wilayah baru dalam dunia pendidikan. Dengan bersemangat mereka menyebarkan berita seakan-akan dunia pendidikan telah menikmati sebuah kebangkitan baru dan kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan yang tak terbayangkan sebelumnya. Teknologi informasi, jaringan kerja antarlembaga pendidikan manca-negara, serta semakin meluasnya kesempatan belajar bagi kaum muda usia sekolah dari berbagai latar belakang sosial dikemukakan sebagai beberapa contoh kemajuan terpenting yang pantas dirayakan dan disyukuri dalam bidang pendidikan. Sejumlah angka statistik dikutip dan dipajang dalam tabel dan grafik.

Kontras kedua pandangan itu sengaja dibikin agak kasar dan berlebihan untuk memperjelas rentang perbedaan sikap yang tumbuh dalam masyarakat terhadap perubahan dunia pendidikan di Indonesia. Betapapun keduanya bertolak belakang, mereka sama-sama sepakat bahwa dunia pendidikan kita telah dan masih sedang mengalami perombakan besar-besaran yang tidak selalu dilaksanakan dengan kesepakatan semua pihak, bahkan kadang-kadang di luar kendali siapa pun, walau dimanfaatkan oleh beberapa pihak secara tidak merata.

Siapa di antara mereka yang benar? Menurut saya keduanya ada benarnya dan ada salahnya. Tetapi, bukan soal salah-benar itu sendiri yang menjadi pokok bahasan di sini. Setiap perubahan sosial besar-besaran menguntungkan sebagian pihak, dan merugikan sebagian pihak lain. Hal yang sama terjadi dalam dunia pendidikan kita, bahkan masyarakat kita secara keseluruhan. Pihak yang dirugikan cenderung membesar-besarkan atau hanya mempersoalkan hal-hal di masa lampau yang indah dan akan segera lenyap. Mereka tidak rela dan cenderung bernostalgia ke masa lampau yang tak mungkin kembali. Pihak yang diuntungkan oleh perubahan itu cenderung membesar-besarkan atau hanya mengamati hal-hal lebih baik yang dijanjikan oleh perubahan yang sedang berlangsung. Kadang-kadang karena asyik, mereka tidak kritis terhadap proses yang masih baru terjadi dan belum sepenuhnya teruji, serta cenderung mengabaikan biaya sosial dan akibat-akibat tak resmi atau tak disengaja atau berjangka-panjang yang tidak segera tampak kasat mata.

Walau berisiko menyederhanakan masalah secara berlebihan dan berisiko akan disalahpahami, saya akan mencoba mengaitkan perbedaan kedua sikap itu dengan dua cara memahami pendidikan yang sangat kontras. Kaum pesimis dan pemuram yang meratapi nasib pendidikan kita cenderung mengartikan pendidikan pertama-tama dan terutama pada persoalan-persoalan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dedikasi, intelektualisme, etika dan tanggung jawab sosial, kejujuran, kreativitas, otonomi individu, kebenaran, mungkin juga kesejahteraan umat manusia secara universal.

Semua itu jelas serba indah dan mulia. Tetapi, semua yang indah dan mulia itu tidak tiba-tiba hadir di muka bumi dan di luar proses sejarah sosial. Ia merupakan produk dari sebuah sejarah yang sering kali berlumuran darah, penuh dengan korupsi dan imoralitas. Berbagai candi termegah di dunia, seperti halnya berbagai peralatan teknologi komputer paling canggih di dunia, merupakan hasil sebuah proses panjang dan berbelit eksploitasi antarmanusia. Para pendidik yang meratapi nasib pendidikan kita jarang sekali mampu dan mau menengok sejarah bobrok yang menyertai terbentuk dan pemuliaan berbagai nilai yang luhur dan indah. Proses olah otak dan hati nurani dianggap berlangsung secara terpisah dari dunia yang bobrok. Pendidikan dianggap bertugas mulia memperbaiki dunia yang terletak "di luar sana", di luar tembok dan pagar sekolah atau kampus.

Kaum optimis yang bersorak-sorai menyambut perubahan besar-besaran (industrialisasi) dalam dunia pendidikan mutakhir cenderung memahami persoalan pendidikan terutama sebagai persoalan angka-angka, hal-hal kebendaan, lembaga, proses interaksi indrawi, dan penerapan pengetahuan atau keterampilan dalam dunia kerja industri. Sekarang pendidikan menjadi jauh lebih tersebar dan terjangkau oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai pelosok dunia. Perbedaan kesempatan bersekolah antara jenis kelamin, atau antara desa dan kota sudah jauh lebih baik. Tidak salah jika ini dianggap sebagai sebuah proses pemerataan dan demokratisasi pendidikan. Proses belajar-mengajar juga jauh lebih fleksibel, bahkan menarik berkat berbagai teknologi informasi. Belajar tidak lagi harus berarti bersusah-payah, memencilkkan diri, bertahan dalam kebosanan, atau mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, lamban dan rumit. Dengan komputer dan internet, pendidikan menjadi penuh warna dan pesona.

Semua itu tidak salah, tetapi proses pemerataan pendidikan juga telah disertai perbedaan jenjang dan gengsi dalam berbagai bentuk baru (akan dibahas lebih lanjut di bawah). Ternyata kemudahan, ketepatan, dan kecepatan proses olah-informasi tidak sama dengan peningkatan kecerdasan, kreativitas, apalagi kepekaan anak-belajar terhadap masalah-masalah sosial. Komputer paling canggih sekali pun tak pernah mampu menjawab persoalan-persoalan etika sosial atau religius yang dapat dikerjakan sebuah sekolah tradisional yang paling bersahaja dalam hal fasilitas teknologi. Malahan berbagai lembaga pendidikan padat-teknologi tinggi telah menumbuhkan sebuah ketergantungan baru pada teknologi yang sangat mencemaskan. Ia juga menumbuhkan penyempitan sikap, minat, serta cakrawala pemahaman persoalan menjadi serba singkat, cepat, dan instrumental. Semua itu masih harus dibayar secara tidak adil dan tidak merata dalam bentuk beban semakin rumitnya berbagai peraturan, perundang-undangan, serta birokrasi dan alienasi.

INDUSTRIALISASI DAN GLOBALISASI PENDIDIKAN

Sesungguhnya karikatur perbedaan di atas itu tidak perlu menjadi sebuah pertentangan ekstrem yang saling meniadakan. Kapan pun dan di mana pun pendidikan merupakan kedua-duanya: hal-hal yang bersifat nilai, budaya dan etika serta hal-hal yang bersifat materi, kelembagaan, kebendaan, serta duniawi. Tetapi, sejarah masyarakat tidak pernah secara netral menempatkan keduanya sama penting dan secara terpadu. Begitu juga di Indonesia.

Sejak pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah-sekolah untuk kaum pribumi, pendidikan formal tidak pernah terlepas dari kepentingan politik ekonomi kaum yang sedang berkuasa secara politik, ekonomi, maupun budaya. Lebih tegasnya, sekolah tidak pernah *semata-mata atau terutama* dimaksudkan sebagai upaya "mencerdaskan kehidupan bangsa" atau memajukan ilmu pengetahuan dunia secara abstrak dan universal, atau menyejahterakan rakyat jelata. Kalau dikatakan tidak *semata-mata atau terutama*, dimaksudkan demikian, bukan berarti ia tidak pernah memberikan dampak demikian. Pendidikan, seperti halnya pranata sosial apa pun yang lain (agama, ekonomi, politik, kesenian, atau bahkan keluarga) selalu berlangsung dengan unsur-unsur yang saling bertentangan. Tetapi, telah terjadi perubahan penting dan makro dalam beberapa tahun belakangan, bukan dalam hal kiblat atau tujuan, tetapi dalam proses dan perangkat kerja yang selanjutnya berpengaruh pada tujuan pendidikan.

Selama bertahun-tahun pendidikan di Indonesia bertumbuh dengan modal piranti keras (kelembagaan, birokrasi, sumber dana dan daya) serba pas-pasan, tetapi semua itu diimbangi oleh modal non-material (semangat, dedikasi, selain kebanggaan, gengsi lokal serta nasional, juga ilusi dan ideologi) yang tinggi. Semua ini mulai mengalami perubahan besar-besaran selama lebih dari 30 tahun masa pemerintahan Orde Baru yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan industri sebagai prioritas terpenting. Pertumbuhan pranata pendidikan pada segi badaniah menjadi penting — bersamaan dengan mekarnya militerisme yang memuliakan otot kekar dan kejantanan — dan ditunjang oleh berbagai bantuan dari negeri-negeri Blok Barat yang menjadi sekutu Orde Baru dalam Perang Dingin.

Berbagai gedung perkuliahan, perpustakaan, atau laboratorium dibangun gencar pada masa ini. Sebagaimana halnya rumah sakit, jalan raya, pusat pertokoan, dan bank di kota-kota di Indonesia. Jumlah pendaftaran mahasiswa menjadi mekar. Lama pendidikan semakin diperpendek, proses kelulusan dipermudah, dan jumlah lulusan diusahakan maksimal serta meningkat secara bersinambungan. Kantor keuangan semua lembaga pendidikan itu menjadi semakin sibuk oleh laju dan besarnya lalu-lintas dana yang masuk dan keluar. Semakin lama, semakin sulit bagi kantor keuangan universitas untuk mengelola sendiri aktivitasnya; mereka harus mengundang kerja sama dengan lembaga

perbankan. Proses pendidikan semakin peka dan berkiblat pada pasaran kerja dalam masyarakat yang mendadak sibuk berindustrialisasi. Tempat parkir di kampus — selain ruang kantin, laboratorium dan perpustakaan — selalu terasa sesak. Semua ini bukan hasil upaya atau keputusan satu orang atau sekelompok yang berkuasa. Ia merupakan gelombang perubahan sosial mendunia yang melibatkan partisipasi jutaan orang dan lembaga, dengan campuran sikap menolak, menerima, dan menghindar.

Salah satu kelanjutan yang tidak dapat dihindari dari proses semacam itu adalah semakin terkaitnya proses pendidikan di berbagai pelosok tanah air dengan apa yang terjadi di mancanegara. Industrialisasi Indonesia sendiri — seperti halnya legitimasi dan militerisme Orde Baru — terkait erat dan mendapatkan banyak dukungan dari kerja sama dengan berbagai kekuatan asing. Ini dapat diamati bukan saja dalam bentuk besarnya banjir beasiswa yang tersedia bagi akademikus Indonesia untuk melanjutkan studi ke negeri-negeri non-Komunis. Juga sebaliknya, kunjungan berbagai akademikus dari negara-negara itu untuk membantu pendidikan di Indonesia. Ada juga berbagai bantuan dalam bentuk kurikulum, piranti pendidikan, struktur administrasi, kiriman buku, teori, dana, hingga sejumlah asumsi pendidikan. Sebagian dari banjir bantuan ini diberikan sebagai tawaran yang disodorkan pihak donor dan diterima dengan penuh terima kasih oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Sebagian juga merupakan hasil usaha meminta-minta dari pihak Indonesia. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa yang terjadi adalah imperialisme atau neo-kolonialisme Barat dalam pengertian pemaksaan sepihak di bidang pendidikan. Yang jelas pendidikan tinggi Indonesia perlahan-lahan meninggalkan model pendidikan Belanda (misalnya gelar Drs/Dra) dan berkiblat pada pendidikan tinggi model Amerika Serikat (misalnya sistem kredit dan masa pendidikan 4 tahun untuk S1).

Seperti halnya perekonomian Indonesia, pendidikan Indonesia tidak saja mengalami proses industrialisasi tetapi juga internasionalisasi. Ada perbedaan penting yang layak disimak di antara proses itu dalam bidang ekonomi dan proses serupa dalam bidang pendidikan. Secara lebih khusus, perbedaan yang penting terjadi pada status dan nasib perusahaan-perusahaan dagang dengan status atau nasib lembaga-lembaga pendidikan. Bagi perusahaan besar, globalisasi biasanya merupakan peluang, rezeki, dan impian yang menjadi kenyataan. Tanpa globalisasi, upaya dagang dan akumulasi modal sering kali terbentur oleh batas-batas kedaulatan, birokrasi, atau sentimen kebangsaan-kenegaraan. Globalisasi dalam bentuk pertumbuhan bidang informasi, komunikasi, dan transportasi merupakan sebuah peluang atau jembatan emas bagi para pemodal untuk menembus berbagai batas ruang dan waktu bagi akumulasi modal dan perbesaran laba sebesar-besarnya.

Seperti telah kita ketahui bersama, semua ini menjadi salah satu sumber keunggulan para pemodal besar jika dibandingkan dengan kaum buruh dan

birokrasi negara, yakni kemampuannya melompat dari satu wilayah (lokal, negara, atau benua) ke wilayah lain. Dengan demikian, ia tidak harus bertahan dengan satu kondisi hubungan industrial di satu lokasi dengan kelompok buruh atau peraturan birokrasi yang menjengkelkan. Kemampuan berpindah-pindah ini, atau mobilitas, membuat pemodal sering kali dibutuhkan daripada membutuhkan baik buruh maupun birokrasi negara tertentu. Kesenjangan serupa barangkali dapat dibandingkan dengan kesenjangan gender pada keluarga tradisional kelas menengah: kaum suami menguasai dunia publik dan memiliki mobilitas tinggi, sementara kaum istri terikat pada dunia domestik. Itu sebabnya berita hengkangnya modal dan pemodal ke luar negeri secara berbondong-bondong di masa krisis dianggap sebagai terompet maut bagi kondisi perekonomian negara yang ditinggalkan. Upaya pemulihan ekonomi sering kali melibatkan usaha merayu dan membujuk pemodal untuk menanamkan kembali modal di negara yang sedang sakit-sakitan, disertai sejumlah janji, perlakuan istimewa, dan kemanjaan supaya mereka kerasan.

Walau tidak dapat dibandingkan secara berlebihan, ilustrasi di atas penting untuk memahami kondisi pendidikan di Indonesia, tetapi secara terbalik. Sementara tenaga dosen, dan terlebih-lebih lagi mahasiswa mempunyai mobilitas internasional tinggi — seperti halnya ilmu, informasi, dan buku perpustakaan — lembaga pendidikan pada umumnya bersifat menetap di suatu lokasi dan struktur birokrasi kenegaraan. Memang ada beberapa universitas mancanegara yang mulai membuka cabang di negara lain atau membina kerja sama dengan lembaga dari negara lain. Tetapi, pada umumnya ia tidak bisa berpindah-pindah lokasi semudah, secepat, atau sebanyak modal dan pemodal dalam dunia perdagangan. Itu sebabnya, lebih banyak usaha untuk membujuk dan membujuk mahasiswa berkualitas dalam skala besar-besaran (juga tenaga pendidik dalam skala lebih kecil) dari berbagai negara untuk bergabung dalam sebuah universitas besar yang terikat dengan sebuah wilayah dan struktur administrasi kenegaraan. Dengan kata lain, mahasiswa (disusul dosen) lebih diuntungkan dan punya keunggulan lebih tinggi daripada universitas dalam proses globalisasi ini. Semakin hari mahasiswa semakin lebih diperebutkan universitas daripada sebaliknya.

Hingga sekitar pertengahan dasawarsa 1990-an, mahasiswa dari Asia yang belajar ke negeri-negeri industrial di Barat dianggap lebih rendah daripada mahasiswa lokal. Para mahasiswa pendatang ini mungkin saja termasuk yang paling cerdas di kelas, tetapi mereka tetap dianggap sebagai makhluk yang berbeda dan tidak akan pernah menjadi sama atau setara dengan anak-anak Barat sendiri. Anak-anak Asia ini dianggap — dan sering kali juga menganggap diri sendiri — sebagai kaum elite dari negeri terbelakang yang beruntung karena mendapatkan pencerahan dari Barat, sebuah warisan peradaban paling unggul di dunia. Mereka harus belajar pandai-pandai berbahasa bekas penjajah ini, mereka harus paham

supan-santan Barat, dan memahami seluk-beluk bekerjanya birokrasi di lembaga pendidikan Barat agar mampu menamatkan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana di negara bekas penjajah.

Mulai pertengahan 1990-an, dan terlebih-lebih lagi pada peralihan menuju abad ke-21, mahasiswa dari Asia dianggap sebagai anak-anak emas, sumber penyelamat banyak lembaga pendidikan di Barat dari bahaya kebangkrutan, bukan karena anak-anak Asia ini rajin atau pandai (walau memang benar banyak di antara mereka biasanya sangat rajin dan sebagian sangat cerdas), tetapi karena mereka mampu mengisi kas keuangan lembaga-lembaga di Barat yang sedang menderita kering kerontang dalam bentuk biaya kuliah dan pendidikan. Walau banyak negara Asia menjadi sasaran utama bantuan keuangan dari berbagai lembaga internasional, dan masih menanggung utang berbukit, Asia juga dianggap sebagai lambang kemakmuran di mata para pengelola pendidikan karena kekayaan para orang tua yang menjadi pejabat negara-negara itu atau pemilik modal di sana.

Anak-anak Asia mendapat perlakuan istimewa dalam berbagai birokrasi pendaftaran dan perkuliahan. Gejala ini tidak merata, dan kini lebih terasa di negeri Australia misalnya, daripada di Amerika Serikat atau Eropa. Tetapi, sebagai gejala umum dia dapat dijumpai di berbagai tempat itu dengan kadar berbeda. Seorang rektor sebuah universitas besar di Australia baru-baru ini menyatakan dengan tegas bahwa pada zaman ini pendidikan merupakan salah satu industri terbesar dan terpenting di dunia. Jadi, pendidikan dapat dideret berdampingan dengan industri komputer, telepon genggam, tekstil, minyak, kalau bukan bursa saham. Rektor yang sama dengan rendah hati mengatakan bahwa universitas tidak mampu mengubah dunia dan membuatnya lebih baik.

Gejala makro itu menjelmakan diri secara keseharian dalam suasana perkuliahan di kelas-kelas di berbagai tempat di dunia. Hukum pasar yang berlaku di antara para pesaing industri pendidikan pada tingkat global juga merebak pada tingkat lokal di kampus dan bahkan di ruang kelas serta bermuara pada interaksi dosen-mahasiswa. Sesuai dengan hukum penawaran-permintaan, fakultas atau jurusan yang laris dianak-emaskan, misalnya ekonomi, bisnis, manajemen, kedokteran, teknik, atau komputer. Adapun bidang pendidikan seperti filsafat, bahasa, sejarah, pendidikan, atau etika diancam tutup karena kurangnya peminat. Para mahasiswa sendiri berbondong-bondong memilih bidang studi yang laris bukan berdasarkan minat dan bakat, tetapi prospek pasar kerja yang tersedia seusai lulus pendidikan. Di masing-masing jurusan yang kering dan kurus, terjadi persaingan dan ancaman serius terhadap status kepegawaian dosen yang kuliahnya kurang diminati mahasiswa. Kelas kecil sama dengan toko yang sepi. Ia harus ditutup karena membebani ongkos lembaga yang bersangkutan, dan dosennya diberhentikan atau diminta mengajar bidang lain yang bukan minatnya tetapi punya nilai pasar.

Di hampir semua kampus di negara-negara industrial, setiap fakultas dihargai dan hanya bisa bertahan hidup apabila berhasil mendatangkan sejumlah mahasiswa peminat dan pembayaran uang kuliah. Akibatnya, setiap dosen yang bekerja di fakultas itu juga dihargai menurut kemampuannya "menjual" perkuliahan yang dihitung menurut jumlah mahasiswa. Semua ini bisa berakibat buruk apabila tidak ada mekanisme kontrol kualitas secara kelembagaan. Untuk menarik mahasiswa sebanyak-banyaknya, para dosen bisa saja berlomba membuat pelajaran seringan mungkin, ujian semudah mungkin, nilai semurah mungkin, pekerjaan rumah sesedikit mungkin, dan supaya mahasiswa senang, membuat perkuliahan sesantai mungkin dengan lelucon dan bukan analisis kritis. Promosi pangkat, status, bonus tahunan, cuti, dan sejumlah hak kerja sang dosen ditentukan antara lain oleh perhitungan semacam itu menurut sebuah rumusan matematika yang sudah dibakukan secara resmi. Akibatnya, di sejumlah fakultas atau jurusan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, jumlah dosen teramat kecil, gaji mereka ditekan seminim mungkin, dan beban tugas mereka berlimpah. Semua ini demi menekan ongkos produksi pendidikan. Akibat berikutnya, para dosen ini terlalu sibuk mempertahankan status kepegawaianya, tak pernah punya waktu cukup untuk berinteraksi dengan mahasiswa di luar jam kuliah, atau bahkan untuk mengembangkan diri secara intelektual.

MASA DEPAN YANG (TIDAK SEPENUHNYA) SAMAR

Perubahan yang digambarkan secara sederhana di atas berlangsung dalam jumlah besar-besaran dan dinamika yang jauh lebih kaya warna serta nuansa daripada yang dapat digambarkan di sini. Tujuan penggambaran itu sederhana, yakni menggarisbawahi sebuah kondisi mutakhir yang bersifat global yang menjadi konteks *masa kini* bagi lembaga dan watak pendidikan tinggi di Indonesia. Gambaran di atas juga sekaligus menjadi sebuah peringatan dalam bentuk contoh apa yang mirip bisa terjadi di Indonesia di *masa depan yang dekat*, apabila stabilitas politik dan sosial Indonesia membaik, perekonomian pulih, dan industrialisasi melaju dengan gencar.

Suka atau tidak, sebuah proses besar-besaran (katakanlah industrialisasi atau kapitalisme global pasca-Perang Dingin) memukul telak sebuah tata sosial dan tradisi pendidikan yang pra-industrial, atau proto-industrial, atau industri-awal di Indonesia dan memaksakan sebuah tata sosial dan tradisi baru yang semakin industrial dan global. Proses ini bukan baru terjadi sekarang. Ia sudah mulai gencar pada masa awal bangkit dan berjayanya pemerintahan Orde Baru dan terlebih lagi sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana Indonesia semakin tercekam dalam kancah pasar kapitalisme global pasca-Perang Dingin yang ditandai oleh kebijakan ekspor non-minyak, swastanisasi, dan demiliterisasi. Pada mulanya proses ini berlangsung gencar dalam bidang perdagangan. Tetapi,

segera ia melebar ke bidang-bidang lain dalam tempo dan irama yang berbeda-beda: pendidikan, politik, keluarga, kesenian, dan sebagainya.

Pendidikan Indonesia yang semula lebih banyak bertumpu pada birokrasi yang berpusat pada partai elite politik yang sedang berkuasa digeser oleh sebuah kompetisi global yang berpusat pada "pasar" yang juga tidak pernah sepenuhnya bebas dan adil. Apa yang terjadi di Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proses perubahan besar-besaran dari negara yang menganut sistem perekonomian komando partai seperti di negara-negara komunis menuju ke pasar setengah-bebas. Walau mengaku anti-komunis, kehidupan sosial-politik, juga kebudayaan dan pendidikan di masa Orde Baru tidak jauh berbeda dari yang ada di negara-negara komunis. Politik dan birokrasi menjadi panglima (sementara jenderal dan panglima menjadi politikus dan pengusaha). Pendidikan menjadi sebuah ritual propaganda dan produksi slogan. Secara perlahan-lahan di tahun 1970-an dan 1980-an, dan secara hebat pada tahun 1990-an, proses itu digempur oleh tuntutan industri kapitalisme global.

Apakah perubahan demikian merupakan sebuah berkah atau bencana? Yang terjadi adalah bergantinya berkah lama dengan berkah baru dan lenyapnya bencana lama digantikan bencana baru. Dampaknya berbeda-beda bagi berbagai kelompok sosial. Yang jelas dengan merosotnya campur-tangan politik dalam pendidikan (kewajiban P4, sloganisme, penindasan lewat Korpri dan Dharma Wanita), tidak berarti pendidikan menjadi serba indah, merdeka, dan otonom. Dalam perubahan yang sedang berlangsung, hukum pasar mendikte dinamika pendidikan dengan berbagai eksisnya.

Bagi sejumlah pengamat pendidikan, paling sedikit hingga sekitar tahun 1990, dunia pendidikan di negara-negara kaya yang sudah lebih suntuk dengan industrial seakan-akan menjadi teladan dan impian. Bagi sebagian akademikus Indonesia serta para orang tua Indonesia yang kaya, pendidikan tinggi di luar negeri ini menjadi alternatif terhadap yang tersedia di Indonesia. Sebuah angan-angan kedaluwarsa biasanya berarak dalam pandangan mereka tentang kehebatan pendidikan di luar negeri itu. Di sana berbagai karya ilmiah dihasilkan. Kelancaran pengajaran dan kelimpahan sumber daya menjadi salah satu legenda yang menggiurkan para akademikus Indonesia, seakan-akan di sana otonomi kampus — bersamaan dengan kebebasan berpendapat dan belajar — menjadi sebuah kenyataan yang lumrah; kreativitas dan segala nilai peradaban yang agung seperti disebutkan pada bagian awal tulisan ini seakan-akan berkelimpahan, padahal di Indonesia menjadi barang langka. Mitos semacam ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan ideologi pasca-kolonial Barat yang bisa dijual untuk menarik minat anak-anak muda Asia agar bersekolah dan membayar uang sekolah di mancanegara.

Di sini ironinya. Di awal tulisan ini dibedakan dua kelompok sikap yang ekstrem dalam memandang perubahan dalam pendidikan. Salah satunya —

kaum pemuram dan pesimis — suka meratapi merosotnya sistem pendidikan di tanah air dengan membatasi pengertian pendidikan pada hal-hal non-material (nilai-nilai sosial, intelektual, etis, dan kreativitas individual). Biasanya kelompok yang sama ini memandang pendidikan di Barat sebagai sebuah surga akademik. Padahal, justru di Baratlah industrialisasi berlangsung secara menggebu-gebu, juga industrialisasi pendidikan. Di Barat, hukum pasar berlaku untuk banyak bidang kehidupan sosial, juga dalam pendidikan melampaui skala yang biasa dibayangkan di Indonesia.

Berbeda dari gambaran umum yang tersebar di Indonesia, kebanyakan akademikus di negeri asing itu tidaklah berlomba-lomba mendalami ilmu semata-mata untuk menemukan kebenaran ilmiah atau jagat raya. Mereka memang bekerja keras, jauh lebih keras daripada rata-rata akademikus di negara berkembang. Tetapi, hal itu mereka kerjakan karena dipaksa oleh sebuah tata kerja yang berupaya mengejar omzet tahunan dalam sejumlah bentuk, material maupun non-material. Penelitian yang serius dan besar-besaran tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan duniawi lembaga yang membiayai penelitian itu.

Kalau negeri orang bukan surga atau alternatif yang ideal, apa alternatif yang tersedia di dalam negeri sendiri? Uraian di atas sudah berusaha menunjukkan bahwa dalam masa globalisasi sekarang batasan dalam/luar negeri semakin kabur walau tidak sepenuhnya lenyap. Industrialisasi pendidikan bukan sebuah pilihan yang bisa dipeluk atau ditolak secara bebas. Ia sudah dan masih sedang menjadi bagian dari tulang-sumsum praktek pendidikan di Indonesia. Karena proses ini baru belakangan berlangsung secara gencar, tidak sedikit yang kaget-kagetan. Misalnya semakin lumrahnya sekolah dan pendidikan tinggi diijakan di iklan dan pusat-pusat perbelanjaan, di antara iklan dan toko yang berjualan shampo, parfum, celana jeans, dan kaset. Ini sama barunya dengan gejala pengiklanan industri warta-berita baik cetak maupun televisi. Orang membuat berita bukan karena ada peristiwa penting, dan orang mengikuti berita bukan karena butuh informasi tentang dunia. Yang terjadi adalah orang berjualan berita dan publik membeli hiburan atau gossip.

Jauh-jauh hari dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri sudah ditanamkan semangat kapitalisme dan hukum pasar, walau pada saat itu patrimonialisme dan feodalisme politik masih menjadi payung besarnya. Bentuknya yang paling konkret adalah sistem kredit. Proses pendidikan dipecah-pecah menjadi satuan unit perkuliahan (atau penelitian, atau kerja laboratorium, atau tugas praktek lapangan) dan dijualbelikan secara eceran. Setiap mahasiswa bekerja dan dinilai secara individual dan dihargai secara kumulatif dalam sebuah medan kegiatan yang bersifat kompetitif. Hal yang sama berlaku untuk sistem penghargaan terhadap kinerja dosen. Juga kinerja fakultas dan jurusan. Proses ini akan dikembangkan secara lebih terbuka dan menyeluruh dalam bentuk otonomi kampus bersamaan dengan melenyapnya otonomi kerja intelektual.

Bila proyek otonomi kampus di Indonesia dilancarkan secara sungguh-sungguh dan berlangsung sukses, maka sulit dibendung, apalagi dilawan, apalagi sebuah kesenjangan sosial dan intelektual yang mencolok. Akan ada sejumlah universitas mahakuat dan mahakaya, ada yang mahalemah dan mahamiskin. Ada bidang studi yang supergiat, gemilang, bergengsi, selain kaya-raya. Ada sejumlah bidang studi yang sangat merana, merayap-rayap, atau punah. Para ilmuwan, dosen, dan peneliti akan juga menempati status, gaji, dan kekuasaan birokrasi kampus dalam sebuah jenjang yang tajam. Sebuah kontradiksi dan konflik kelas (seperti yang dikemukakan berbagai kritikus terhadap kapitalisme) akan menjadi lebih gamblang.

Nicholas Abercrombie, Immanuel Wallerstein, Louis Althusser, dan Pierre Bourdieu merupakan sebagian dari para pemikir asing dari negeri-negeri industrial yang pernah membantu pemahaman saya tentang betapa pentingnya lembaga pendidikan bukan saja sebagai barang dagangan seperti yang dikemukakan rektor yang saya kutip di atas, tetapi sebagai semacam basis atau benteng baru bagi kelas borjuasi dan kelas menengah untuk melanggengkan kekuasaannya. Modal dan kekuasaan tidak lagi berputar hanya atau terutama di sekeliling penguasaan atau pemilikan perusahaan, tanah, atau properti lain, tetapi juga dalam bentuk pengetahuan, informasi, dan yang terpenting sertifikasi resmi atas pengetahuan dan informasi itu!

Kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh pemilikan modal keuangan, tetapi juga pengetahuan, ijazah, serta selera budaya. Seperti Ivan Illich pada masa sebelumnya, Wallerstein mengingatkan di mana pun di dunia, tidak ada sekolah yang sepenuhnya terbuka dan menampung semua anak usia sekolah di masyarakatnya. Dengan berbagai dalih (misalnya ujian saringan), sekolah akan mempertahankan sebuah pintu yang tertutup bagi kelas tertindas. Yang kita saksikan sekarang, dan tidak termasuk bahasan para pemikir itu, proses pemisahan kelas sosial ini berlangsung global, melintasi batas-batas negara, jenis kelamin, usia, warna kulit, atau agama.

Proses transformasi sosial besar-besaran yang dibahas dalam seluruh karangan ini tidak sepenuhnya negatif atau positif bagi semua orang secara seragam. Seperti halnya dalam berbagai bidang lain, sebagian pihak yang sudah kuat dan sudah diuntungkan oleh kondisi sosial akan menjadi lebih kuat dan berjaya. Sebagian besar yang lain dirugikan, bukannya karena tidak mendapat bangku kuliah (kesempatan itu secara formal makin terbuka pada banyak orang), tetapi karena kualitas dan kategori pendidikan yang mereka peroleh berada di jenjang terbawah dari sebuah diskriminasi kelas yang baru. Bagi kelas borjuasi yang baru bertumbuh di Indonesia, dan kelas menengah kota yang berbakat, perubahan yang sedang terjadi boleh jadi merupakan sebuah proses pemerdekaan, kemajuan, perkembangan, dan peluang emas. Paling sedikit proses itu merupakan pembebasan dari beban yang tak pernah dibutuhkannya: belajar indoktrinasi

Pancasila ala Orde Baru, pelajaran agama dan budaya yang berisi hafalan, atau berbelitnya birokrasi pendidikan yang rasialis dan feodalis. Pendidikan yang berdasarkan otoriterisme dosen segera akan berakhir.

Dua pertanyaan berikut tidak pernah mudah dijawab, tetapi tidak pernah mungkin diabaikan. *Pertama*, sejauh mana perbaikan nasib dan kekuasaan kaum borjuasi dan kelas menengah profesional itu punya relevansi dan konsekuensi bagi proses panjang demokratisasi yang lebih luas? Sebagian ilmuwan sosial berpandangan bahwa kebangkitan kaum bermodal itu merupakan sebuah prasyarat untuk mengakhiri gejala patrimonialisme, feodalisme, atau yang belakangan disebut KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), juga militerisme dan otoriterisme ala Orde Baru. Bukan karena borjuasi dan kelas menengah itu ratu adil yang bermoral tinggi, tetapi untuk mengejar kepentingan mereka sendiri, mereka akan mengusahakan sebuah tata sosial politik dan ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan transparan. Jadi, ada semacam kontradiksi dan dialektika dalam proses sosial ini. Tetapi, tidak sedikit ilmuwan sosial yang menolak pandangan ini, dan percaya semacam determinisme yang monolitik bahwa kalau kelas yang berkuasa bersifat rakus dan korup, maka seluruh pranata sosial dengan sendirinya rusak.

Pertanyaan *kedua*, yang dapat dipertimbangkan untuk mengakhiri ulasan ini: Kalau proses industrialisasi itu akan membawa Indonesia ke keadaan yang tidak lebih baik, atau bahkan lebih buruk, apa pilihan lain yang tersedia? Adakah pilihan lain itu? Sejauh mana industrialisasi pada umumnya, dan industrialisasi pendidikan pada khususnya, dapat ditolak atau diambil alih secara sepotong-sepotong sesuka kita? Dalam beberapa dasawarsa yang lampau, banyak negeri otoriter di Asia berpikir bahwa modernitas dari Barat dapat, bahkan perlu, diimpor untuk kemajuan dan pembangunan negeri sendiri, tetapi secara sepotong-sepotong menurut visi dan kepentingan penguasa Asia itu sendiri. Maka, dari pemerintahan negeri Komunis seperti RRC hingga rezim antikomunis seperti Orde Baru pernah mengimpor ilmu dan teknologi Barat sambil menolak filsafat, budaya, dan etika dominan di Barat yang dianggap terlalu individualis, sekuler, borjuis, atau dekaden. Ada yang menerima bahkan meminta-minta modal asing dan kecanduan utang luar negeri dari Barat, tetapi menolak gagasan politik Barat (seperti oposisi dan demokrasi liberal) atau gagasan sosial (seperti feminisme dan hak asasi), dan ekonomi (seperti hak berserikat buruh dan pemogokan). Tampaknya hingga hari ini berbagai usaha seperti itu gagal, atau banyak gagalnya. Proses perubahan sosial sulit dipilah-pilah karena pada dasarnya kehidupan sosial itu punya tali-temali erat, walau tidak selalu menyebar secara seragam dan merata ke berbagai wilayah di dunia ini. ***